

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TAHUN 2019

PROGRAM : Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah	INSTANSI : Biro Infrastruktur dan SDA Setda Prov. Jateng
KEGIATAN : Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan ANGGARAN : Tahun 2018 : Rp. 400.000.000,- Tahun 2019 : Rp. 200.000.000,-	BAGIAN : Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian

1. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Setda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas tersebut Setda mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian **penyusunan kebijakan** Daerah;
- b. pengoordinasian **pelaksanaan tugas Perangkat Daerah**;
- c. **pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah**;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Pada Rancangan Program/Kegiatan Setda Tahun 2019 – 2023 disusun dengan mempertajam Indikator Kinerja Kegiatan/Program/Sasaran/Tujuan Berbasis Tusi Setda. Dari keseluruhan fungsi yang ada diturunkan menjadi 9 (sembilan) program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing biro sesuai dengan SKPD ampuan seperti yang tertuang dalam Mekanisme Kerja dan Perumpunan Asisten Sekda Prov Jateng.

Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah melaksanakan 3 (tiga) program yaitu :

- a. Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Program peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan daerah;
- c. Program Peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah.

Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah diarahkan untuk mengawal visi dan misi Gubernur serta mengidentifikasi kebijakan strategis sesuai dengan bidang ampunan masing-masing.

Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan mengalokasikan anggaran guna terfasilitasinya penyusunan laporan monitoring Bidang Ketahanan Pangan.

Isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2019, merupakan isu yang telah diangkat dalam RPJMD Tahun 2013-2018. Kebijakan pembangunan daerah tahun 2019 ditujukan untuk "Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan Dan Pemanfaatan Iptek". Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2019 tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah meliputi :

1. Penanggulangan kemiskinan;
2. Penguatan daya saing ekonomi daerah;
3. Kualitas hidup dan daya saing SDM;
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
5. **Ketahanan pangan dan energi;**
6. Kesenjangan wilayah;
7. Tata kelola pemerintahan.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam **fokus pembangunan**. Ketahanan Pangan dengan fokus pada perwujudan ketahanan pangan masyarakat dan daya saing pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan dengan mempertahankan luasan lahan pertanian; penyediaan infrastruktur pengolahan, penyimpanan, meningkatkan kewirausahaan, manajemen dan bisnis petani serta distribusi; peningkatan aksesibilitas pangan dengan menjaga stabilitas harga dan pasokan; peningkatan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dengan pengembangan diversifikasi, membangun kesadaran masyarakat terhadap pangan beragam, serta peningkatan kualitas, nilai tambah dan keragaman produk pangan; peningkatan mutu dan keamanan pangan; pengembangan dan penerapan inovasi teknologi pasca panen.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Tantangannya tidak hanya terkait dengan ketersediaan dan kecukupan pangan utama, tetapi juga bagaimana meningkatkan keberagaman konsumsi pangan masyarakat, agar tercukupi kebutuhan gizi masyarakat. Tantangan lain adalah bagaimana menyiapkan produk pangan kita berorientasi ekspor

dan mampu bersaing di pasar global nasional, baik produk pangan mentah maupun olahan.

Kondisi ketersediaan pangan di Jawa Tengah selama ini tergolong cukup, namun di sisi lain cakupan konsumsi pangan dan keragaman konsumsi pangan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa konsumsi pangan terbanyak masyarakat Jawa Tengah adalah beras, bahkan melebihi dari angka ideal yang ditetapkan yaitu 91 kg/kapita/tahun, sementara konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, serta sayur dan buah justru jauh dari standar konsumsi ideal.

Meskipun ketersediaan pangan dan tingkat konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah sudah baik meskipun belum beragam, namun perlu diperhatikan faktor lain yang mempengaruhi ketahanan pangan yaitu faktor distribusi pasar, yang dibarengi dengan daya beli masyarakat yang terjaga.

Sesuai Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah untuk bisa mengawal pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan daerah terkait Bidang Ketahanan Pangan maka diperlukan strategi dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan yang sinergis antar sektor, melalui sinkronisasi dan sinergitas kegiatan antar SKPD terkait Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan stake holder terkait dalam rangka mewujudkan dan mensukseskan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu untuk mendukung program kegiatan tersebut di atas dialokasikan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dilaksanakannya Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan adalah dalam rangka monitoring pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan ketahanan pangan, mulai dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota, stakeholder lain dan masyarakat luas sehingga pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah akan sesuai dengan arah yang sudah ditetapkan dan sesuai/tepat pada sasaran.
- b. Tujuan kegiatan tersebut adalah terfasilitasinya penyusunan laporan monitoring di Bidang Ketahanan Pangan.

3. Lokasi dan Sasaran Kegiatan :

Lokasi dan Sasaran Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan adalah SKPD terkait Tingkat Provinsi,

Pemerintah dan SKPD Kabupaten/Kota, KTNA, poktan/gapoktan, santriwan/santriwati dan pelaku usaha.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

NO	TAHAP KEGIATAN	RINCIAN	KET
1.	Persiapan	Penyusunan RKO	
2.	Pelaksanaan	a. Rapat-rapat monitoring Bidang Ketahanan Pangan b. Rapat Koordinasi monitoring Bidang Ketahanan Pangan c. Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran dan Promosi d. Fasilitasi Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi Jawa Tengah e. Fasilitasi Pengembangan Agribisnis Terpadu Berbasis Pesantren f. Konsultasi dan koordinasi ke Kementerian terkait g. Monitoring dan evaluasi	
3.	Pelaporan	Penyusunan laporan monitoring Bidang Ketahanan Pangan	

5. Jadwal Kegiatan

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU
1	Persiapan : Penyusunan RKO	Januari - Pebruari
2	Pelaksanaan : a. Rapat-rapat monitoring Bidang Ketahanan Pangan b. Rapat Koordinasi monitoring Bidang Ketahanan Pangan c. Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran dan Promosi d. Fasilitasi Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi Jawa Tengah e. Fasilitasi Pengembangan Agribisnis Terpadu Berbasis Pesantren f. Konsultasi dan koordinasi ke Kementerian terkait g. Monitoring dan evaluasi	Maret - Nopember
3	Pelaporan : Penyusunan Laporan Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	Desember

6. Keluaran

- a. Rapat-rapat monitoring Bidang Ketahanan Pangan sebanyak 8 kali;
- b. Rapat Koordinasi monitoring Bidang Ketahanan Pangan sebanyak 1 kali;
- c. Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran dan Promosi sebanyak 1 kali;
- d. Fasilitasi dan Persiapan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3 kali;
- e. Fasilitasi Pengembangan Agribisnis Terpadu Berbasis Pesantren sebanyak 1 kali;
- f. Laporan Monitoring Bidang Ketahanan Pangan sebanyak 2 laporan.

7. Anggaran

Total anggaran yang dibutuhkan adalah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). Rincian terlampir.

8. Penutup

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun, sehingga pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik dan sesuai/tepat sasaran guna mendukung upaya terwujudnya ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 2018

KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN
SUMBER DAYA ALAM

Dra. PENI RAHAYU, M.Si
NIP. 19620921 198903 2 005